



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131 FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : B.6981/Kp.110/A2/12/2022

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 324 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, Kementerian Pertanian memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Pertanian.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
4. Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. Badan Karantina Pertanian;
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian.

**II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN/
FORMASI**

Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi Kebutuhan/Formasi dan Unit Kerja Penempatan secara detail dapat diakses di laman <http://casn.pertanian.go.id>.

III. KRITERIA PELAMAR

1. Pelamar Umum

Merupakan pelamar warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan tidak termasuk penyandang disabilitas.

2. Pelamar Penyandang Disabilitas

Merupakan pelamar Penyandang Disabilitas baik fisik, sensorik, mental dan/atau intelektual, dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Para Penyandang Disabilitas dapat mendaftar pada formasi jabatan yang diinginkan apabila mempunyai ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar Penyandang Disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan Penyandang Disabilitas;
- 3) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dibuktikan dengan:
 - a) Surat Keterangan dari Dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas (asli) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - b) Video singkat dengan durasi 10-15 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar (misalnya: berjalan, duduk di depan komputer, mengetik surat dengan komputer, dan menunjukkan hasil ketikannya tanpa harus dicetak/print dan/atau ditambah aktivitas lainnya sesuai jabatan yang dilamar serta menunjukkan kedisabilitasnya terutama yang tidak terlihat). Kemudian pelamar mengunggah video tersebut di *youtube/googledrive/dropbox*/penyimpanan lainnya, selanjutnya menginput *link*/tautan video (bukan videonya) ke aplikasi SSCASN yang telah diunggah;

IV. PERSYARATAN

A. Umum

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jenjang terampil/ahli pertama/ahli muda kecuali untuk jabatan dosen paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun pada saat menyelesaikan pendaftaran online di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - Batas usia dimaksud memperhatikan Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) dan batas usia paling tinggi pelamar sesuai jenjang jabatan (sesuai Lampiran I);
 - Batas usia sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing jabatan fungsional dan ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;

2. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan PPPK)
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, dilengkapi pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan PPPK;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku, dilengkapi pada saat dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir Seleksi Pengadaan PPPK;
10. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah (dengan menandatangani surat pernyataan);
11. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama masa hubungan perjanjian kerja berlaku;
12. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan **sertifikasi keahlian tertentu** yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
13. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama di bidang kerja yang sesuai dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar (sesuai Lampiran I);

14. Pengalaman sebagaimana disebut pada angka 13 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (Human Resources Development), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

B. Khusus

1. Memiliki sertifikat pelatihan/workshop/seminar yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan/instansi pemerintah/organisasi profesi untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai Lampiran II;
2. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku) dengan ketentuan:
 - a. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2 dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 3,00 (tiga koma nol-nol);
 - b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2 dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 3,00 (tiga koma nol-nol);
 - c. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, kualifikasi pendidikan Sarjana/S1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,50 (dua koma lima puluh);
 - d. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, kualifikasi pendidikan Sarjana/S1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,50 (dua koma lima puluh);
 - e. SMU Jurusan IPA, SMK Bidang Pertanian/Perkebunan/Hortikultura/Peternakan/Kesehatan Hewan yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai ijazah/ujian sekolah rata-rata minimal 6,50 (enam koma lima puluh).

V. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

Dokumen persyaratan terdiri atas:

a. Dengan kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2, Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III

- 1) Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Pertanian RI di Jakarta, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi meterai Rp.10.000,- untuk format surat lamaran dapat diunduh pada laman <http://casn.pertanian.go.id>;
- 2) Surat-surat Pernyataan (2 surat) diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi meterai Rp.10.000,-;
- 3) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
- 4) Pas foto berlatar belakang merah berukuran 4x6 (foto minimal 150kb, maksimal 300kb, tipe file jpg);
- 5) Dokumen kelulusan pendidikan dengan format *pdf* meliputi:
 - a) Ijazah dan Transkrip Nilai Asli atau fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir cap basah dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani (bukan legalisir yang difotokopi/scan yang dicetak)
 - (1) Untuk Kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2:
dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi dalam BAN-PT pada saat lulus dengan IPK 3,00 (tiga koma nol-nol);
 - (2) Untuk Kualifikasi pendidikan Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III:
dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi dalam BAN-PT pada saat lulus dengan IPK 2,50 (dua koma lima puluh);
 - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
- 6) Surat akreditasi (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah) yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi atau cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan program studi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya).

- 7) Surat Keterangan dari Dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas (asli) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya bagi pelamar disabilitas;
- 8) Untuk pelamar disabilitas membuat Video singkat dengan durasi 10-15 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar (misalnya: berjalan, duduk di depan komputer, mengetik surat dengan komputer, dan menunjukkan hasil ketikannya tanpa harus dicetak/*print* dan/atau ditambah aktivitas lainnya sesuai jabatan yang dilamar serta menunjukkan kedisabilitasnya terutama yang tidak terlihat). Kemudian pelamar mengunggah video tersebut di *youtube/google drive/dropbox*/penyimpanan lainnya, selanjutnya menginput *link*/tautan video (bukan videonya) ke aplikasi SSCASN yang telah diunggah.

b. Dengan kualifikasi pendidikan SMU Jurusan IPA, SMK Bidang Pertanian/Perkebunan/ Hortikultura/Peternakan/Kesehatan Hewan

- 1) Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Pertanian RI di Jakarta, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi meterai Rp.10.000,- format surat lamaran dapat diunduh pada laman <http://casn.pertanian.go.id>;
- 2) Surat-surat Pernyataan (2 surat) diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi meterai Rp.10.000,- format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <http://casn.pertanian.go.id> dan dokumen tersebut dijadikan dalam satu *file*, kemudian diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 3) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
- 4) Pas foto berlatar belakang merah berukuran 4x6 (foto minimal 150kb, maksimal 300kb, tipe file jpg);
- 5) Dokumen kelulusan pendidikan dengan format *pdf* meliputi:
 - a) Ijazah dan Daftar Nilai Ijazah (Ujian Nasional) atau fotokopi Ijazah dan Daftar Nilai Ijazah (Ujian Nasional) yang dilegalisir cap basah dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani (bukan legalisir yang difotokopi/*scan* yang dicetak), dengan nilai ijazah/ujian sekolah rata-rata minimal 6,50 (enam koma lima puluh);
 - b) Surat Penyetaraan Ijazah dan Transkrip Nilai dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi (bagi lulusan Luar Negeri).
- 6) Surat akreditasi (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah) yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi atau cetakan

tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan program studi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya);

- 7) Surat Keterangan dari Dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas (asli) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya bagi pelamar disabilitas;
- 8) Untuk pelamar disabilitas membuat Video singkat dengan durasi 10-15 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar (misalnya: berjalan, duduk di depan komputer, mengetik surat dengan komputer, dan menunjukkan hasil ketikannya tanpa harus dicetak/*print* dan/atau ditambah aktivitas lainnya sesuai jabatan yang dilamar serta menunjukkan kedisabilitasnya terutama yang tidak terlihat). Kemudian pelamar mengunggah video tersebut di *youtube/google drive/dropbox/penyimpanan lainnya*, selanjutnya menginput *link/tautan* video (bukan videonya) ke aplikasi SSCASN yang telah diunggah.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan:
 - a. menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan NIK Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga;
 - b. menggunakan alamat *email* aktif;
 - c. membuat *password* dan membuat jawaban pengaman;
 - d. mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 4x6 (foto minimal 150kb, maks 300kb, tipe *file* jpg); dan
 - e. mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Selanjutnya pelamar kembali *login* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan, dengan:
 - a. mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/surat keterangan perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 150kb, maks 300kb, tipe *file* Jpg);
 - b. memilih instansi Kementerian Pertanian;
 - c. memilih jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan;
 - d. melengkapi data dan *form* yang tersedia sesuai jenjang pendidikan;
 - e. dokumen yang diunggah adalah *scan* berkas asli berwarna (tidak hitam putih), dan memastikan dokumen yang diunggah dapat dibuka/*file* tidak rusak, terbaca, dan jelas;
 - f. mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2022.
3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui portal: <https://sscasn.bkn.go.id>.

VII. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi terdiri atas Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi.

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
- b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
- c. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian;
- d. Khusus untuk jenis formasi penyandang disabilitas, sebelum seleksi administrasi diumumkan, apabila diperlukan terlebih dahulu dilakukan verifikasi tatap muka untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- e. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
- f. Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- g. Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
- h. Apabila sanggahan diterima, Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

2. Seleksi Kompetensi

- a. Peserta Seleksi Kompetensi adalah pelamar yang Memenuhi Persyaratan (MP) seleksi administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dengan cakupan materi meliputi:
 - 1) Kompetensi Teknis;
 - 2) Kompetensi Manajerial;
 - 3) Kompetensi Sosial Kultural;
 - 4) Wawancara.
- c. Kompetensi Teknis
 - 1) Dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;

- 2) Kebijakan penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kepada:
 - a) peserta penyandang disabilitas;
 - b) peserta yang memiliki sertifikat kompetensi (sesuai Lampiran II).
 - 3) Kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
 - 4) Wawancara untuk penilaian integritas dan moralitas dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- d. Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan:
- 1) Pelamar penyandang disabilitas yang mengunggah surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - 2) bagi pelamar yang memiliki dan mengunggah sertifikat kompetensi untuk jabatan (lampiran II) mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - 3) dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 secara kumulatif, diberikan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- e. Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akan diumumkan lebih lanjut pada laman <http://casn.pertanian.go.id>.
- f. Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir;
- g. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;

2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan dan diberikan Kartu Peserta Ujian untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi;
3. Peserta yang tidak lulus Seleksi Administrasi diberikan waktu untuk melakukan sanggahan terhadap Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi selama 3 (tiga) hari dari diterbitkannya Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi;
4. Penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara (Panselnas);
6. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN;
7. Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Dalam hal Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian menerima alasan sanggahan, Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi;
8. Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
9. Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;

IX. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi sesuai dengan kota provinsi yang dipilih pelamar di portal <https://sscasn.bkn.go.id>;

X. LAIN-LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) ditentukan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun (sesuai Lampiran I), serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan;
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, untuk formasi jabatan yang unit penempatannya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seluruhnya dialihkan ke unit kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang telah diumumkan;

4. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
5. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) Instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK; atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah sehingga mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus;
7. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri dan jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan;
8. Para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu kepada Panitia Pengadaan PPPK dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kementerian Pertanian;
9. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan PPPK dibebankan pada pelamar;
10. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur;
11. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan/data pelamar/pendaftar/peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau surat pernyataan yang telah ditandatangani, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/PPPK;
12. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) tahun 2021 (formasi tahun 2020) kemudian mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar pada penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2022;
13. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan ASN untuk periode berikutnya;
14. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digugurkan kelulusannya;
15. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
16. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
17. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar/pendaftar/peserta menjadi milik panitia;
18. Informasi resmi yang terkait dengan pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. laman <http://casn.pertanian.go.id>;
 - b. telepon (021) 7804276 (yang dapat dihubungi pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d.16.00 WIB);

- c. e-mail casn@pertanian.go.id;
d. Facebook <https://www.facebook.com/casn.kementan.1>;
20. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 melalui email: casn@pertanian.go.id.

Jakarta, 20 Desember 2022

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
selaku Ketua Panitia Pengadaan
PPPK Kementerian Pertanian,



Dr. Zulkifli, MM

NIP. 196912021994031002

**JADWAL SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan data final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023

Keterangan:

Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <http://casn.pertanian.go.id>.

Jakarta, 20 Desember 2022
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
selaku Ketua Panitia Pengadaan PPPK
Kementerian Pertanian,



Zulkifli

NIP 196912021994031002

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 PERTANIAN / S-1 PERTANIAN STATISTIK	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA , DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 GEOGRAFI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 GEODESI / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 EKONOMI	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN , DIREKTUR PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN DITJEN PSP
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 GEOGRAFI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 GEODESI / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 EKONOMI	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN , DIREKTUR IRIGASI PERTANIAN
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 ADMINITRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTARI NEGERA / S-1 ILMU KEPEGAWAIAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU SOSIAL POLITIK	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN , KEPALA BAGIAN TATA USAHA PUSLITBANGBUN , KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA PUSLITBANGBUN
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN SDM	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN GOWA
6.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN SDM	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
7.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
8.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN SDM	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
9.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , INSPEKTUR JENDERAL , SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
10.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI UMUM / S-1 ADMINITRASI NEGARA / S-1 MANAGEMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
11.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA
12.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KBPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
13.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
14.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 KEARSIPAN / S-1 PETERNAKAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA BAGIAN TATA USAHA PUSLITBANG PETERNAKAN , KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA PUSLITBANG PETERNAKAN
15.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS / S-1 KEARSIPAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BPTP SULAWESI TENGGARA
16.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
17.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI UMUM / S-1 ADMINITRASI NEGARA / S-1 MANAGEMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK ENJENERING PERTANIAN INDONESIA
18.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS / S-1 KEARSIPAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BPTP JAMBI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
19.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BALITBANGTAN , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT BALITBANGTAN
20.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI
21.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL POLITIK	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN , KEPALA BAGIAN TATA USAHA PASCAPANEN BALITBANG , KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN PASCAPANEN BALITBANG
22.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYADITJENBUN
23.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
24.	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
25.	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN , KEPALA BAGIAN UMUM BBPTU-HPT BATURRADEN
26.	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	4	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , DIREKTUR KESEHATAN HEWAN , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN
27.	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , DIREKTUR KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PASCAPANEN
28.	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI
29.	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR , KEPALA BAGIAN UMUM BBVET DENPASAR
30.	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR
31.	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 SEJARAH	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN
32.	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 AGRONOMI / S-1 PEMULIAAN TANAMAN / S-1 BIOLOGI	5	3	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
33.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNANDITJENBUN
34.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM / S-1 TEKNIK MESIN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA , DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
35.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 AGRONOMI	5	3	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA , DIREKTUR PERBENIHAN HORTIKULTURA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
36.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA , DIREKTUR SAYURAN DAN TANAMAN OBAT
37.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN	5	3	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA , DIREKTUR BUAH DAN FLORIKULTURA
38.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA , DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
39.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN	S-1 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 BIOLOGI NON KEPENDIDIKAN / S-1 PROTEKSI TANAMAN / S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA , DIREKTUR PERLINDUNGAN HORTIKULTURA
40.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI
41.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
42.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT
43.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
44.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
45.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BANGKA BELITUNG
46.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT
47.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
48.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
49.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
50.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
51.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TENGAH
52.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
53.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN GORONTALO
54.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , SEKRETARIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
55.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SARJANA MANAJEMEN / S-1 SOSIAL / S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN , KEPALA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BBP MEKTAN , KEPALA SEKSI PROGRAM BBP MEKTAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
56.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU TANAH / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI DAN BISNIS / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
57.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
58.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PETERNAKAN / S-1 EKONOMI DAN MANAJEMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI PUSLITBANG PETERNAKAN , KEPALA SUB BIDANG PROGRAM PUSLITBANG PETERNAKAN
59.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU TANAH / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI DAN BISNIS / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN , KEPALA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BB SDLP , KEPALA SEKSI PROGRAM BB SDLP
60.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUMAS / S-1 KEHUMASAN	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , SEKRETARIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
61.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU TANAH / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
62.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU TANAH / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN GOWA
63.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , INSPEKTUR JENDERAL , SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
64.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU TANAH / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA
65.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
66.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI
67.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU TANAH / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
68.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN , KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PEREKAYASAAN BBP MEKTAN , KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN HASIL PEREKAYASAAN BBP MEKTAN
69.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
70.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN , KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN BB SDLP , KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN BB SDLP

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
71.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU TANAH / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
72.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU TANAH / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
73.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN DKI JAKARTA , KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP DKI JAKARTA
74.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
75.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PENGKAJIAN BB PENGKAJIAN , KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN HASIL PENGKAJIAN BB PENGKAJIAN
76.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
77.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BAGIAN KERJASAMA, HUKUM, ORGANISASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT BALITBANGTAN , KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT BALITBANGTAN
78.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA , KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP SULAWESI TENGGARA
79.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 DESIGN KOMUNIKASI VISUAL	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN SEKRETARIAT BALITBANG , KEPALA SEKSI PELAYANAN ALIH TEKNOLOGI BALAI PATP
80.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT PUSLITBANGBUN , KEPALA SEKSI JASA PENELITIAN BALITTRO
81.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA , KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS BALITSEREAL
82.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 KEHUMASAN / S-1 PETERNAKAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN PUSLITBANG PETERNAKAN , KEPALA SUB BIDANG PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN PUSLITBANG PETERNAKAN
83.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 KEHUMASAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN , KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN BB BIOGEN , KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN BB BIOGEN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
84.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN , KEPALA BAGIAN UMUM DITJENBUN , KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DITJENBUN
85.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	5	5	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK
86.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
87.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA
88.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
89.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI
90.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU
91.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
92.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
93.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA , KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP SULAWESI TENGGARA
94.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN GOWA
95.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
96.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
97.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	5	2	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
98.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN PUSLITBANG TANAMAN PANGAN , KEPALA SUB BIDANG PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN PUSLITBANG TANAMAN PANGAN
99.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN VETERINER , KEPALA BIDANG KERJASAMA PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN BB LITVET , KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN BB LITVET
100.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT , KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN SULAWESI BARAT
101.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT , KEPALASEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP SUMATERA BARAT

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
102.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
103.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI
104.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
105.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENELITIAN PERTANIAN LAHAN RAWA , KEPALA KASI PELAYANAN JASA PENELITIAN BALITTRA
106.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT PUSLITBANGBUN , KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS BALITTRO
107.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI
108.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BAGIAN UMUM DITJEN PKH
109.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-IV PERTANIAN / D-IV PETERNAKAN / S-1 PERTANIAN / S-1 PETERNAKAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK ENJENERING PERTANIAN INDONESIA
110.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	S-1 PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
111.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	S-1 PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
112.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	S-1 PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
113.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	S-1 PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN , KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU
114.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	S-1 PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN GOWA
115.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	S-1 PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
116.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	S-1 PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI
117.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
118.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI
119.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
120.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN DKI JAKARTA , KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP DKI JAKARTA
121.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
122.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
123.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA , KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP SULAWESI TENGGARA
124.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI
125.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PENGKAJIAN BB PENGKAJIAN , KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN HASIL PENGKAJIAN BB PENGKAJIAN
126.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN , KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU
127.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN SEKRETARIAT BALITBANG , KEPALA SEKSI PELAYANAN ALIH TEKNOLOGI BALAI PATP
128.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN GOWA
129.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
130.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TENGAH , KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP JAWA TENGAH
131.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN PUSLITBANG PETERNAKAN , KEPALA SUB BIDANG PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN PUSLITBANG PETERNAKAN
132.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENELITIAN LINGKUNGAN PERTANIAN , KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIK DAN JASA PENELITIAN BALINGTAN
133.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIK	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
134.	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 AGRONOMI / S-2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-2 TEKNIK PERTANIAN / S-2 ILMU TANAH / S-2 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-2 HAMA PENYAKIT TANAMAN / S-2 PETERNAKAN / S-2 DOKTER HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
135.	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 AGRONOMI / S-2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-2 TEKNIK PERTANIAN / S-2 ILMU TANAH / S-2 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-2 HAMA PENYAKIT TANAMAN / S-2 PETERNAKAN / S-2 DOKTER HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
136.	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 AGRONOMI / S-2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-2 TEKNIK PERTANIAN / S-2 ILMU TANAH / S-2 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-2 HAMA PENYAKIT TANAMAN / S-2 PETERNAKAN / S-2 DOKTER HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBAUNG
137.	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 AGRONOMI / S-2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-2 TEKNIK PERTANIAN / S-2 ILMU TANAH / S-2 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-2 HAMA PENYAKIT TANAMAN / S-2 PETERNAKAN / S-2 DOKTER HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
138.	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 AGRONOMI / S-2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-2 TEKNIK PERTANIAN / S-2 ILMU TANAH / S-2 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-2 HAMA PENYAKIT TANAMAN / S-2 PETERNAKAN / S-2 DOKTER HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
139.	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 AGRONOMI / S-2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-2 TEKNIK PERTANIAN / S-2 ILMU TANAH / S-2 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-2 HAMA PENYAKIT TANAMAN / S-2 PETERNAKAN / S-2 DOKTER HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA
140.	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 AGRONOMI / S-2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-2 TEKNIK PERTANIAN / S-2 ILMU TANAH / S-2 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-2 HAMA PENYAKIT TANAMAN / S-2 PETERNAKAN / S-2 DOKTER HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
141.	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-2 AGRONOMI / S-2 TEKNIK PERTANIAN / S-2 ILMU TANAH / S-2 PERKEBUNAN / S-2 DOKTER HEWAN / S-2 ILMU TERNAK / S-2 PETERNAKAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
142.	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-2 AGRONOMI / S-2 TEKNIK PERTANIAN / S-2 ILMU TANAH / S-2 PERKEBUNAN / S-2 DOKTER HEWAN / S-2 ILMU TERNAK / S-2 PETERNAKAN	5	4	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI
143.	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 PERTANIAN / S-2 PERKEBUNAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
144.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG
145.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA
146.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA
147.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
148.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN BELAWAN
149.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON
150.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA
151.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	5	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
152.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BALIKPAPAN
153.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN
154.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAMBI
155.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	4	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MANADO
156.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I MERAUKE
157.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN
158.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
159.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TANJUNG BALAI ASAHAN
160.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PONTIANAK
161.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG
162.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR
163.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II ENDE
164.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	4	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE
165.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BATAM
166.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II MAMUJU
167.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TIMIKA
168.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG
169.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II KENDARI
170.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	5	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR
171.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNG PINANG
172.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SAMARINDA
173.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BIAK

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
174.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN
175.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PALEMBANG
176.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU
177.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK
178.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDA ACEH
179.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II MANOKWARI
180.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN
181.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG
182.	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	SMU IPA / SMK PETERNAKAN / SPP SNAKMA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
183.	PEMULA - PARAMEDIK VETERINER	SMK PETERNAKAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
184.	PEMULA - PARAMEDIK VETERINER	SMK PETERNAKAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
185.	PEMULA - PARAMEDIK VETERINER	SMK PETERNAKAN	5	4	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI BESAR VETERINER MAROS , KEPALA BAGIAN UMUM BBVET MAROS
186.	PEMULA - PARAMEDIK VETERINER	SMK PETERNAKAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR , KEPALA BAGIAN UMUM BBVET DENPASAR
187.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNG PINANG
188.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN
189.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG
190.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I CILACAP
191.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II KENDARI
192.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA
193.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON
194.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	8	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
195.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TIMIKA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
196.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II ENDE
197.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA
198.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BALIKPAPAN
199.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BIAK
200.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR
201.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II GORONTALO
202.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN BELAWAN
203.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	4	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN
204.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	4	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
205.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SAMARINDA
206.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SURABAYA
207.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
208.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR
209.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MANADO
210.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN
211.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PALEMBANG
212.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK
213.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE
214.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA
215.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I MERAUKE
216.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDA ACEH
217.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
218.	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	SMU IPA / SMK PERTANIAN / SPP PERTANIAN / SPMA PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BATAM
219.	PEMULA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	SMK PERTANIAN	5	3	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN AMBONDITJENBUN
220.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , INSPEKTUR JENDERAL , SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
221.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ADMINISTRASI / D-III PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BALITBANGTAN , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT BALITBANGTAN
222.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA
223.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
224.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA
225.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI
226.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI
227.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN YOGYAKARTA
228.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE
229.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II KENDARI
230.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT
231.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT PUSLITBANGBUN , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BALITTRO
232.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA BAGIAN TATA USAHA PUSLITBANG PETERNAKAN , KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA PUSLITBANG PETERNAKAN
233.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN	5	4	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , SEKRETARIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
234.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BALITSEREAL
235.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN , DIREKTUR SEREALIA
236.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ADMINISTRASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BENIH BUN
237.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
238.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA
239.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANTAN
240.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR
241.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
242.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
243.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
244.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	4	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
245.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEKRETARIS DAN MANAJEMEN / D-III PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III ARSIPARIS / D-III SEKRETARIS	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN
246.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI BISNIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA LOKA PENELITIAN KAMBING POTONG PUSLITBANG PETERNAKAN , KEPALA URUSAN TATA USAHA LOKA PENELITIAN KAMBING POTONG
247.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEKRETARIS DAN MANAJEMEN / D-III PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III ARSIPARIS / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II MAMUJU
248.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN , KEPALA BAGIAN UMUM DITJENBUN , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA DITJENBUN
249.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
250.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEKRETARIS DAN MANAJEMEN / D-III PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III ARSIPARIS / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TIMIKA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
251.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	2	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN
252.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN
253.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK
254.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
255.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA BAGIAN TATA USAHA PUSLITBANG TANAMAN PANGAN , KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA PUSLITBANG TANAMAN PANGAN
256.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN , DIREKTUR PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
257.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BAGIAN UMUM DITJEN PKH
258.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI / D-III PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III SEKRETARIS / D-III KEARSIPAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
259.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG
260.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI PUSLITBANG TANAMAN PANGAN , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BALITKABI
261.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III SEKRETARIS	5	3	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
262.	TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PETERNAKAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN
263.	TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PETERNAKAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR
264.	TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PETERNAKAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG
265.	TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PETERNAKAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG
266.	TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PETERNAKAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SURABAYA
267.	TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PETERNAKAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
268.	TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PETERNAKAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II MANOKWARI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
269.	TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PETERNAKAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II ENDE
270.	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
271.	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
272.	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI MALANG , KEPALA BAGIAN UMUM
273.	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN , KEPALA BAGIAN UMUM BBPTU-HPT BATURRADEN
274.	TERAMPIL - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	D-III PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
275.	TERAMPIL - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	D-III PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN , KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PONTIANAK
276.	TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN	D-III PERTANIAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDANDITJENBUN
277.	TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN	D-III PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYADITJENBUN
278.	TERAMPIL - PENGAWAS MUTU PAKAN	D-III PETERNAKAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG
279.	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	D-III PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYADITJENBUN
280.	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	D-III PERTANIAN / D-III BIOLOGI / D-III AGROTEKNOLOGI / D-III AGROEKOTEKNOLOGI	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDANDITJENBUN
281.	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	D-III PERTANIAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , KEPALA BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAKDITJENBUN
282.	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-III KEHUMASAN / D-III KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT
283.	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA LOKA PENELITIAN KAMBING POTONG PUSLITBANG PETERNAKAN
284.	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-III KEHUMASAN / D-III KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI PUSLITBANG TANAMAN PANGAN , KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS BALITKABI
285.	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-III ILMU KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA LOKA PENELITIAN SAPI POTONG PUSLITBANG PETERNAKAN
286.	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-III KEHUMASAN / D-III KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK , KEPALA SEKSI JASA PENELITIAN BALITNAK

TENAGA TEKNIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
287.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BALITBANGTAN , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT BALITBANGTAN
288.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMATIKA / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , INSPEKTUR JENDERAL , SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
289.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT
290.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , SEKRETARIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
291.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
292.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK KOMPUTER	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN PUSLITBANG PETERNAKAN , KEPALA SUB BIDANG PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN PUSLITBANG PETERNAKAN
293.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
294.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA
295.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
296.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
297.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN , DIREKTUR PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
298.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN , KEPALA BAGIAN UMUM DITJEN PKH
299.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA , KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS BALITSEREAL
300.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT , KEPALASEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP SUMATERA BARAT
301.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
302.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN , KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN PASCAPANEN BALITBANG , KEPALA SEKSI KERJASAMA PASCAPANEN BALITBANG
303.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO HUKUM

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
304.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN , DIREKTUR SEREALIA
305.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK
306.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN , DIREKTUR ANEKA KACANG DAN UMBI
307.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER	5	2	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
308.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA BAGIAN TATA USAHA PUSLITBANG TANAMAN PANGAN , KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA PUSLITBANG TANAMAN PANGAN
309.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI PUSLITBANG TANAMAN PANGAN , KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS BALITKABI
310.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-III PERTANIAN / D-III PETERNAKAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI
311.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-III PERTANIAN / D-III PETERNAKAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
312.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-III PERTANIAN / D-III PETERNAKAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
313.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT
314.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BPTP SULAWESI TENGGARA
315.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
316.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
317.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BPTP KALIMANTAN BARAT
318.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
319.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BANGKA BELITUNG , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BPTP BANGKA BELITUNG
320.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA , DIREKTUR SAYURAN DAN TANAMAN OBAT
321.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN , KEPALA BAGIAN TATA USAHA BBP MEKTAN , KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN BBP MEKTAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
322.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN YOGYAKARTA
323.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN SDM / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA LOKA PENELITIAN PENYAKIT TUNGRO PUSLITBANG TANAMAN PANGAN , KEPALA URUSAN TATA USAHA LOLIT TUNGRO
324.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA LOKA PENELITIAN KAMBING POTONG PUSLITBANG PETERNAKAN
325.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , INSPEKTUR JENDERAL , SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
326.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TENGAH , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BPTP JAWA TENGAH
327.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
328.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN SDM / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN , KEPALA BAGIAN TATA USAHA BB BIOGEN , KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN BALAI BESAR BIOGEN
329.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
330.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BPTP JAMBI
331.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN , KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
332.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
333.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAH
334.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI
335.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN , KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP KALIMANTAN SELATAN
336.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI
337.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT , KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP KALIMANTAN BARAT
338.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
339.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
340.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III ILMU PERPUSTAKAAN / D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA , SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
341.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BPTP SULAWESI TENGAH
342.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT , KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN SULAWESI BARAT
343.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT , KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP PAPUA BARAT
344.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI PUSLITBANG TANAMAN PANGAN , KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS BALITKABI
345.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA , KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS BALITSEREAL
346.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT , KEPALASEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN BPTP SUMATERA BARAT
347.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO HUKUM
348.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PERTANIAN , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN
349.	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III ILMU PERPUSTAKAAN	5	2	MENTERI PERTANIAN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN , KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN , KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK , KEPALA SEKSI JASA PENELITIAN BALITNAK
TOTAL				493	



NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMABAHAN NILAI	BOBOT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Dosen	Asisten Ahli	-	-	-	Pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi
2	Pamong Budaya	Ahli Pertama	-	Sertifikat keahlian/profesi bidang kebudayaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang/Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan	25%	
3	Widyaiswara	Ahli Pertama	Sertifikasi dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada 1. KKNi Metodologi Pelatihan Jenjang 3, dan 2. Perancangan Program dan Media Pelatihan	-	-	
4	Pustakawan	Terampil	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Serifikasi Profesi (LPS) Pustakawan	15%	
		Ahli Pertama	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Serifikasi Profesi (LPS) Pustakawan	15%	
5	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Serifikasi Profesi (LPS) Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian	25%	
6	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Serifikasi Profesi (LPS) Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian	25%	
7	Penyuluh Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Serifikasi Profesi (LPS) Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian	25%	